Bab V

Kesimpulan

Iran merupakan satu dari sekian negara yang memiliki hak untuk mengembangkan tenaga nuklirnya. Tergabung dalam NPT menjadi salah satu alasan kuat mengapa negara para Mullah itu memiliki argumen kuat soal perkembangan yang tengah mereka lakukan. Tak bisa dipungkiri, masuknya Iran ke dalam NPT berasal dari campur tangan Amerika Serikat yang di tahun 1950-an memiliki pengaruh kuat di Iran.

Ini karena faktor sekutu yang kuat dengan pemimpin Iran saat itu, Shah Reza Pahlevi. Kebijakan apa pun yang diterapkan AS pada Iran, disetujui oleh Shah karena memiliki imbalan besar dalam kelanggengan kepemimpinannya.

Namun hal ini berubah di tangan Imam Khomeini yang datang menggeser Shah lewat perlawanan Revolusi di tahun 1979. Segala hal yang berbau Barat disingkirkan oleh Khomeini, ternasuk nuklir. Tetapi dengan segala sumber daya yang ada, sulit untuk Khomeini mengacuhkan potensi nuklir yang ada di negaranya.

Setelah mengalami mati suri selama beberapa saat, nuklir Iran akhirnya berkembang kembali di tahun 1990-an. Saat itu –hingga sekarang- kuat sekali pengaruh Rusia dan Cina dalam perkembangan kembali tersebut. Dengan berbagai pasokan fasilitas dan sumber daya manusia, Iran jadi bisa melakukan kembali siklus nuklirnya dengan sempurna.

Namun, AS tentu saja menentang penggunaan nuklir ini dengan alasan ancaman keamanan. Tadinya masalah ini tidak dianggap sebagai isu besar karena Iran terlihat tidak melakukan perkembangan nuklir yang mencolok. Namun hal ini langsung berubah di tahun 2002 saat Iran mengumumkan pada dunia sudah menemukan sumber baru dari nuklirnya. AS yang saat itu tengah disibukkan dengan masalah terorisme langsung terkejut apalagi melihat siklus nuklir tersebut nyaris sempurna.

AS menggunakan pengaruhnya di PBB untuk menekan Iran menghentikan nuklir itu. Alasan yang digunakan AS adalah hal itu bisa digunakan untuk perkembangan senjata pemusnah massal yang sangat membahayakan bagi umat manusia. Dalam periode 2003-2005, Iran terlihat hanya sebagai bahan cercaan AS di meja Dewan Keamanan. Mereka tak punya pelindung kuat dari segala kecaman itu dan hanya berpegangan pada kerangka hukum kalau apa yang mereka lakukan adalah sah. Kecaman yang dilakukan AS bahkan termasuk dalam doktrinasi media dengan menyatakan pada dunia kalau Iran berbahaya dengan segala fasilitas nuklir yang mereka miliki.

Namun hal ini berubah di tahun 2005 saat Mahmoud Ahmadinejad terpilih sebagai Presiden

Republik Islam Iran. Mantan guru dan walikota Teheran itu berhasil melewati serangkaian Pemilihan Umum yang disinyalir penuh dengan kecurangan menjatuhkan dirinya. Ia melewati hadangan itu dan menang telak dengan jumlah suara mencapai 60 persen lebih.

Ahmadinejad menajamkan perbedaan AS dengan Iran lewat kebijakan kontroversialnya sola nuklir. Menurut Ahmadinejad apa yang dilakukan negaranya tidaklah salah dan dalam kerangka hukum yang sama dengan negara-negara peratifikasi NPT lainnya. Namun kebijakan ini tentu tidak berjalan begitu saja tanpa adanya dukungan dari pemimpin nomor satu Iran, Ali Khameini. Tambahan lagi, kebijakan itu juga harus didukung oleh masyarakat yang dipimpin Ahmadinejad di Iran.

Dukungan dari Khameini sudah jelas terlihat dalam pernyataannya di depan sidang dewan parlemen Iran. Sedangkan dukungan dari masyarakat diperoleh lewat beberapa faktor peranan pemimpin yang cukup panjang dan rumit. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah pengubah visi, pemberi semangat, pengendali organisasi, menangani konflik dan pemelihara masyarakat. Kesemua hal ini bisa dilakukan Ahmadinejad dengan cukup baik. Suatu perbuatan yang akhirnya berpengaruh besar dalam perananannya sebagai pemimpin Iran soal kebijakan nuklir Iran.

Dalam pengubah visi dan pemberi semangat, Ahmadinejad bisa memberikan sesuatu yang sudah lama tidak dirasakan kembali oleh masyarakat Iran. Yaitu pandangan kalau AS dan sekutunyalah yang membutuhkan Iran, bukan sebaliknya. Dalam pandangan Ahmadinejad yang ia bagi bersama masyarakatnya dalam beberapa orasi, AS tidak memiliki pandangan yang sama dengan Iran. Maka itu AS mustahil dapat berperan positif bagi kemajuan bangsa Iran. Apalagi, seperti kata Ahmadinejad, hubungan dengan AS bukanlah suatu yang saat ini dibutuhkan oleh negara dan bangsa Iran.

Pandangan kalau AS-lah yang lebih membutuhkan Iran menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi dari masyarakat Iran. Hal ini mengingatkan mereka pada kejayaan Iran di tahun 1979 ketika Revolusi menjatuhkan Shah Reza Pahlevi. Revolusi yang sekaligus mengakhiri kekuasaan AS di Iran selama beberapa dekade. Saat itu dipimpin oleh Imam Ali Khomeini, Iran berani menentang kekuasaan AS dan menjalankan negara independen tanpa adanya ketergantungan berlebih pada negara adi kuasa itu. Saat ini di bawah kepemimpinan Ahmadinejad, bangsa Iran kembali merasakan hal yang sama atas hal yang terjadi 30 tahun lalu itu.

Ada empat alasan utama yang Ahmadinejad kemukakan tiap kali ditanya alasannya soal nuklir. Pertama, itu adalah hak legal bangsa Iran. Kedua, perkembangan teknologi yang paling canggih ini akan jadi pembuktian pada pihak Barat. Ketiga, kemampuan untuk mengelola teknologi secanggih ini akan jadi pompaan semangat sendiri buat bangsa Iran yang kerap ditekan oleh Barat. Keempat, penerapannya sendiri dalam kebutuhan listrik akan menempatkan Iran dalam jajaran negara maju

secara cepat.

Dalam peranannya sebagai seorang pengendali organisasi terlihat jelas dalam konstitusi Iran. Dalam undang-undang tersebut, Ahmadinejad (Eksekutif) berada di bawah posisi seorang *fakih* atau pemimpin tertinggi. *Fakih* bertanggung jawab atas segala kebijakan-kebijakan umum Iran dan mengomandoi angkatan bersenjata, intelejen, dan punya hak mengumumkan perang.

Sedangkan sebagai pemangku jabatan kedua terpenting di Iran, Ahmadinejad berkewajiban menjalankan segala kebijakan yang ada di negaranya. Meski terkadang keputusan itu dipengaruhi oleh *fakih*, Ahmadinejad-lah yang menjadi wakil Iran di muka dunia soal kebijakan luar negeri yang diambil oleh negaranya, termasuk masalah nuklir. Memang tidak semua rakyat meyakini kebijakan ini sebagai yang terbaik. Namun seperti disampaikan Soemardi, kekuasaan itu bersifat memaksa. Dengan demikian keputusan kebijakan nuklir yang dijalankan Ahamdinejad bersifat mengikat. Hal ini ditegaskan lagi oleh Thomas Dyle dan Laswell, kalau kebijakan publik adalah pilihan Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan nuklir ini membuat mereka yang berkuasa (Pemerintah Iran) mendapat sebagian besar apa yang mereka inginkan. Dalam hal ini, Ahmadinejad sebagai pelaksana Pemerintahan mendapat kepercayaan dari rakyatnya.

Dua peranan lagi yang dilakukan Ahmadinejad sebagai seorang pemimpin adalah dalam penanganan konflik dan pemelihara masyarakat. Konflik di sini tentu saja dengan AS dan bagaimana cara Ahmadinejad menangani hal tersebut hingga tidak membahayakan keamanan masyarakatnya. Namun uniknya meski secara tegas menyatakan ketidaksukaannya pada kekangan AS soal kebijakan nuklir Iran, AS tidak berani menyerang secara militer.

Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk soal konsumsi minyak AS dan intervensi mereka di Irak. AS adalah negara konsumen minyak nomor satu di dunia dan penyerangan Iran yang nota bene adalah penghasil minyak nomor empat di dunia (nomor dua di OPEC) akan mendatangkan kerugian untuk AS. Letak Iran sangat geografis yang merupakan jalur tanker dunia juga masuk dalam pertimbangan. Bagaimana tidak, Selat Hormuz yang ada di negara Iran digunakan 40 persen oleh tanker-tanker minyak di dunia. Banyak negara yang menggantungkan nasib konsumsi minyaknya dari jalur ini.

Bila AS menebar ancaman pada Iran, maka bisa dibalas dengan melonjaknya harga minyak dunia. Iran juga bisa balik mengancam akan menahan import minyak ke pangsa pasar bila segala ancaman itu kembali ditujukan pada mereka.

Sedangkan menyangkut kedudukan AS di Irak adalah soal kedekatan jarak. Bila dulu keduanya dipisahkan oleh dua benua, kini Iran dan AS bisa dibilang bertetangga. Ancaman bersenjata pun makin dekat di depan pintu Iran. Pertimbangan membangun pertahanan yang kuat, bisa dijadikan

faktor pendukung masyarakat Iran menambah dukungan mereka soal senjata nuklir. Namun di mata masyarakat dunia, AS sudah melakukan kesalahan besar dengan menyerang Irak. Bila kesalahan itu ditambah dengan menyerang Iran, maka posisi AS di mata dan pergaulan dunia akan sangat terganggu.

AS sempat mengakali konflik ini dengan cara diplomatis melalui meja sidang Dewan Keamanan PBB. AS mendesak agar PBB dan IAEA (Badan Atom Internasional) melakukan inspeksi menyeluruh di fasilitas nuklir Iran. Namun dalam laporan yang disampaikan IAEA terbukti kalau segala tuduhan AS soal Iran membangun senjata pemusnah massal tidaklah benar. Hal ini dipastikan oleh kepala IAEA, Mohammad El Baradei. Ia menyatakan ada pemutarbalikan fakta dari hasil laporan yang mengatasnamakan lembaganya. Dalam laporan yang sebenarnya, terlihat kalau nuklir Iran berada dalam tingkatan yang rendah dan hanya berguna untuk bahan bakar reaktor tenaga nuklir.

Namun, dalam laporan yang sudah dicampuri Intelejen AS, malah menunjukkan sebaliknya. Laporan palsu itu menyatakan kalau nuklir Iran sudah dalam tahap membahayakan. Kebohongan AS malah kembali dibuktikan oleh salah satu mantan intelejen seniornya, Scott Ritter, yang menyatakan kalau Iran tak punya keinginan dan sumber daya yang memadai untuk pembentukan senjata mematikan.

Kalau pun mau membandingkan, maka AS lah yang sebenarnya memiliki senjata nuklir mematikan. Dalam periode 1940-1950'an, AS berkali-kali melakukan ujicoba membahayakan di udara terbuka. Meski letaknya di daerah terpencil, hal itu tetap membahayakan bagi kelangsungan makhluk hidup dan ekosistem sekitar.

Inilah yang coba dijadikan argumen dasar oleh Ahmadinejad. Ia merasa nuklir yang berada di negaranya tidaklah seberapa dengan apa yang dimiliki AS. Apalagi Iran juga berada dalam kerangka hukum kuat karena termasuk anggota NPT. Jadi tak ada alasan kuat atas segala tuduhan yang dialamatkan AS pada negaranya. Kalaupun mau menyalahkan, Ahmadinejad merasa AS-lah yang harusnya terkena sanksi PBB. Pasalnya, AS berani mempersenjatai Israel -yang bukan negara anggota NPT- dengan nuklir.

Dalam pemaparan di atas terlihat betapa kuatnya peranan Ahmadinejad sebagai pemimpin Iran dalam kebijakan nuklir Iran. Ahmadinejad berhasil memadukan lima faktor penting yang harus dimiliki pemimpin dalam berperan atas anggotanya dalam suatu organisasi. Ahmadinejad melaksanakan pengarahan visi, pemberi semangat, pengendali organisasi, menangani konflik dan pemelihara masyarakat, dengan cukup baik.

Dari sini, masyarakat Iran mulai mengambil posisi sebagai pendukung Ahmadinejad dalam

kebijakan nuklir Iran. Mantan dosen itu dianggap sosok pria yang teguh dengan prinsip-prinsip idealisme yang dianutnya. Ia mengingatkan bangsa Iran pada perjuangan Khomeini dimana segala sesuatunya mungkin diwujudkan dan akan berbuah manis buat Iran. Kalau bangsa Iran bersatu teguh untuk menghadapi kekuatan besar dan menghadapi semua lawan. Kekuatan –dalam hal ini nuklir- memiliki justifikasi dan dengan begitu akan menang dengan sendirinya. Ahmadinejad juga membuktikan karismanya melalui kejadian atau krisis yang terjadi. Sebuah perilaku yang mendongkrak popularitas diri Ahmadinejad dan kebijakan nuklir itu sendiri.

Kendati demikian musti kita ingat pula dalam perang nuklir tidak akan ada pihak yang jadi pemenang. Dampak lingkungan dan korban nyawa yang ditimbulkannya masih terlalu hebat untuk diabaikan begitu saja. Masih terngiang buat masyarakat dunia efek dari bom atom Hiroshima dan Nagasaki yang terjadi tahun 1945. Atau bagaimana bocornya fasilitas nuklir di Chernobryl, Ukraina. Ketika terkena ledakan bom itu, makhluk hidup akan mati seketika. Sedangkan yang tidak tewas, akan merasakan dampaknya seumur hidup bahkan diturunkan pada generasi sesudahnya. Sedangkan Chernobryl hingga hingga saat ini masih menjadi daerah dengan tingkat radiasi tinggi. Akibatnya masyarakat di sana sudah terbiasa dengan mutasi gen pada tubuh yang menyebabkan cacat seumur hidup. Kekurangan tubuh itu akan mereka alami hingga beberapa generasi lagi sebelum akhirnya racun radiasi hilang dari udara, tanah, air, di daerah tersebut.

Tepat rasanya bila nuklir kemudian disematkan sebagai penemuan manusia yang paling menakutkan. Dunia akan terasa lebih baik tanpa adanya ancaman ini. Kalau memang AS ingin memulai kampanye menyelamatkan umat manusia dari ancaman nuklir, maka hal itu harus dimulai dari mereka. Karena hingga saat ini, AS-lah pemilik dan pengolah nuklir terbesar di dunia.

Adalah tugas berat yang diemban oleh pengganti Bush, Barrack Obama, untuk serius mewujudkan dunia tanpa nuklir. Berbagai verifikasi dan mekanisme harus segera ia jalani untuk mencegah industri nuklir menyebar di seluruh dunia. Pasalnya tanpa adanya ikatan komitmen yang jelas dari AS, negara-negara non NPT bisa menggunakannya untuk menghindari inspeksi, peraturan atau kontrol ketat dari nuklir yang ada. Sebuah panduan wajib yang nantinya bisa mengurangi jumlah nuklir di dunia bahkan menghilangkannya sama sekali.